

PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN DI PONDOK PESANTREN DINIYYAH PUTRI LAMPUNG

by M.nursalim Dan Ellya Rosana

Submission date: 17-Apr-2023 06:11AM (UTC+0700)

Submission ID: 2066311366

File name: Tapis_10-2-2014.pdf (78.09K)

Word count: 4081

Character count: 26659

PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN DI PONDOK PESANTREN DINIYAH PUTRI LAMPUNG

M. Nursalim dan Ellya Rosana

Abstrak

Subordinasi perempuan di bidang politik juga diakibatkan karena adanya budaya politik patriarki yang menjadi acuan dalam proses politik suatu di Indonesia. Budaya politik pada hakekatnya berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang merupakan dasar dari semua tindakan. Tindakan ini dilandasi oleh nilai-nilai yang telah berkembang dalam diri warga negara, baik sebagai individu maupun kelompok. Nilai-nilai yang disokong oleh tradisi ini membentuk budaya politik. Pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan : 1. Untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan pandangan serta perilaku peserta tentang pemberdayaan politik perempuan, 2. Mampu merubah mindset (cara pikir) peserta menjadi lebih memiliki kemandirian kesadaran berpolitik yang sangat kuat yang terus berpihak kepada politik perempuan

Kata Kunci: Perempuan, Gender, Politik

Pendahuluan

Kita akan mengalami kegagalan jika tidak sanggup melakukan pekerjaan yang tersedia dalam keseharian sebagai bagian dari cara mengajarkan dan melaksanakan demokrasi pada diri sendiri dan masyarakat umum. Kegagalan dan keberhasilan dalam berdemokrasi akan ditentukan oleh perilaku yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, sebab itulah sesungguhnya cerminan berdemokrasi yang paling nyata yang diharapkan berimbas pada berdemokrasi dalam parlemen (dalam ruang lingkup publik). Perjuangan perempuan akan berhasil tatkala mendapatkan dukungan publik politik. Akan tetapi, perjuangan perempuan akan gagal tatkala energi yang dimiliki

M. Nursalim Malay dan Elly Rosana: PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN ...

terkurus habis karena bergelut dengan masalah sendiri (kaum perempuan) yang tidak mampu diorganisir, dinegosiasi dan dikompromikan dalam realitas politik yang masih dominan bias gender (bias laki-laki).

Selama kurun waktu ini sering masih terjadi kesalahpahaman dan ketidakjelasan tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan usaha emansipasi kaum perempuan. Hal ini karena belum ada uraian yang mampu menjelaskan mengenai konsep gender dan mengapa hal ini penting untuk memahami ketidakadilan sosial.

Untuk memahami konsep gender perlu dibedakan kata gender dengan seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Secara permanen ini tidak dapat diubah dan merupakan ketentuan biologis, sering dikatakan sebagai kodrat¹.

Sedangkan konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri sebenarnya dapat dipertukarkan. Artinya laki-laki bisa saja lemah lembut, emosional, keibuan/keibuan sementara ada juga perempuan yang kuat dan perkasa. Perubahan ciri dan sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain.²

Subordinasi perempuan di bidang politik juga diakibatkan karena adanya budaya politik patriarki yang menjadi acuan dalam proses politik suatu di Indonesia. Pemikiran Muhaimin tentang budaya politik pada hakekatnya berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang merupakan dasar dari semua tindakan³.

¹ Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, h. 8

² Fakih, Mansour, *Analisis Gender*, h. 8-9

³ Muhaimin, dalam Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*, Kibar Press, Yogyakarta, 2008, h. 186

M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PERBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN..

Tindakan ini dilandasi oleh nilai-nilai yang telah berkembang dalam diri warga negara, baik sebagai individu maupun kelompok. Nilai-nilai yang disokong oleh tradisi ini membentuk budaya politik.

Masyarakat Indonesia yang secara sosio kultural merupakan masyarakat plural mempunyai satu bentuk sistem politik yang spesifik karena adanya peran militer yang unik. Rezim militer memperlihatkan gaya laki-laki dan ini terpenetrasi dalam budaya dan etos politik formal. Budaya dan etos politik ini diwarnai oleh gaya hidup maskulin. Sehingga akhirnya laki-lakilah yang memformulasi aturan-aturan politik sesuai nilai dan norma laki-laki.

Ada dua kekhasan yang melekat pada budaya politik Indonesia⁴. Pertama, struktur hubungan yang memperlihatkan adanya hubungan patron-klien (bapak-anak atau bawahan-atasan), dan kedua adanya rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Meskipun dua hal tersebut adalah percampuran berbagai macam budaya, namun budaya dari Suku Jawalah yang paling dominan. Dominasi ini karena memang orang Jawa yang senantiasa mendominasi kehidupan politik di Indonesia.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah untuk memberikan penyuluhan mengenai pemberdayaan politik perempuan, sehingga peserta mengetahui, memahami dan bias berperilaku sesuai dengan yang diharapkan yaitu adanya afirmatif terhadap kaum perempuan, selain pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan :

- a. Untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan pandangan serta perilaku peserta tentang pemberdayaan politik perempuan,
- b. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang pemberdayaan politik perempuan,

⁴ Muhaimin, dalam Musdah Mulia. *Menuju Kemandirian Politik* , h. 187

- c. Mampu merubah mindset (cara pikir) peserta menjadi lebih memiliki kemantapan kesadaran berpolitik yang sangat kuat yang terus berpihak kepada politik perempuan.

Pemberdayaan Perempuan

Penulis menggunakan teori pemberdayaan yang berakar dari teori feminis, yang dikembangkan oleh Jessie Bernard adalah sebuah generalisasi dari berbagai sistem gagasan mengenai kehidupan sosial dan pengalaman manusia, yang dikembangkan dari perspektif yang terpusat pada perempuan. Teori ini terpusat pada perempuan dalam tiga hal. Pertama, sasaran utama studinya, titik tolak seluruh penelitiannya adalah situasi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat. Kedua, dalam proses perempuan dijadikan “sasaran” sentral, artinya mencoba melihat dunia khusus dari sudut pandang perempuan terhadap dunia sosial. Ketiga, teori feminis dikembangkan oleh pemikir kritis dan aktifis atau pejuang demi kepentingan perempuan, yang mencoba menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk perempuan dan juga untuk kemanusiaan.⁵

Selanjutnya pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, pemberdayaan menekankan pada proses pengalihan daya kepada masyarakat atau individu tersebut lebih berdaya. Kedua, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Artinya pemberdayaan adalah suatu proses, sebagai suatu proses maka perlu suatu upaya untuk mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, dan sumber daya agar mampu membela dirinya⁶. Istilah pemberdayaan perempuan merupakan penerjemahan dari istilah women empowerment yang muncul dalam diskursus gender. Istilah ini sendiri muncul karena keprihatinan bersama terhadap kaum perempuan yang telah berabad-abad terdiskriminasi dari kebijakan

⁵ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2007. 403-404

⁶ Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, 12

M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PERBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN..

program pembangunan sebagai akibat dari paham patriarki yang sudah mengakar⁷.

Pemberdayaan perempuan dimulai dengan tidak membiarkan mereka bodoh dan dibodohi. Perempuan tidak dibiarkan untuk tidak mendapatkan informasi. Perempuan tidak dibiarkan untuk tidak sadar bahwa konstruksi budaya patriarki telah meletakkan posisi lemah baginya. Berbagai pembenaran diciptakan untuk melestarikan posisi tersebut. Oleh karena itu untuk tidak membiarkan perempuan ketinggalan informasi, kesadaran gender perlu dipromosikan, karena ideology gender yang mempunyai akibat ketidakadilan gender telah banyak merugikan perempuan.⁸

Pemberdayaan perempuan dalam operasionalisasinya ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, dalam proses pemberdayaan hendaklah menekankan pada proses pendistribusian kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan pada perempuan secara seimbang agar mereka lebih berdaya. Untuk mewujudkan hal ini perlu merubah struktur dan kultur yang menghambat pemberdayaan perempuan, yang selama ini telah mendistribusikan komponen di atas menjadi tidak seimbang. Kedua, dengan proses menstimulasi dan memotivasi kaum perempuan agar berdaya dan mandiri dalam menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Pemberdayaan perempuan juga sangat mengedepankan persoalan kemandirian kaum perempuan agar tidak terlalu bergantung kepada orang lain, agar potensi dan kemampuan yang dimilikinya dapat diaktualisasikan secara maksimal. Kemandirian yang sejati memberikan kekuatan untuk melakukan tindakan lahir dan kemandirian berfikir dalam menentukan sikap.⁹

⁷ Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema*, 2001, 12

⁸ Nunuk P. Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga)*, buku II, Magelang: Indonesia Tera, 2004, 251

⁹ Fuad, Ariyana Wahidah, Mursyidah Thahir (ed.), *Relevansi Gerakan Feminisme dalam Konsep Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000. 78

M. Nursalim Malay dan Elly Rosana: PEMBERDAYAAN POLITIK
PEREMPUAN ...

Seseorang sudah dapat dikatakan berdaya dan mandiri apabila ketika dia telah mengenal jati dirinya dengan segala potensi yang dimiliki. Perempuan mandiri adalah perempuan yang mampu melihat potensi yang ada secara keseluruhan, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain. Perempuan yang mandiri juga kreatif, terampil menciptakan sesuatu yang baru, mampu berpandangan realistis, kuat dalam permasalahan dan kuat dalam proposinya, ia juga berani melakukan sesuatu dan dapat memegang kebenaran serta berani memberikan kritik, dengan demikian ia mampu berdiri di atas keyakinannya walaupun tanpa bantuan orang lain.¹⁰

Beberapa organisasi yang memberdayakan perempuan dengan cara menanamkan ide mengenai kesadaran kesetaraan dan keadilan gender sejak masih anak-anak. Hal ini dimaksudkan agar generasi mendatang menjadi generasi yang mempunyai kesadaran yang cukup tinggi mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Dengan penanaman semacam itu diharapkan perempuan akan mendapatkan posisi yang setara dengan laki-laki, sehingga mereka tidak lagi ragu menentukan pilihan hidupnya.

Masalah Politik Perempuan di Indonesia

Untuk memahami permasalahan perempuan di bidang politik, paling tidak ada empat hal bisa kita peajari. Keempat hal ini merupakan permasalahan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Ketiga akar masalah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Disempahaman Gender dan Subordinasi Perempuan dalam Politik

Marginalisasi dan ketidakadilan sosial selalu menjadi tema menarik dalam setiap pemikiran dan konsepsi tentang masyarakat di masa sekarang dan yang akan datang. Dan dari sejarah ketidakadilan ini telah memunculkan banyak teori dan analisis sosial yang hingga detik ini masih berpengaruh dalam membentuk sistem sosial di masyarakat kita.

¹⁰ Murniati, *Getar Gender*, 119

M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PERBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN..

Ketidakadilan dalam aspek hubungan antar jenis kelamin merupakan salah satu dari berbagai macam gugatan yang diajukan para ilmuwan sosial. Salah satu konsep penting yang perlu dipahami dalam membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Hal ini penting untuk memahami persoalan kaum perempuan. Karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat.

Selama kurun waktu ini sering masih terjadi kesalahpahaman dan ketidakjelasan tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan usaha emansipasi kaum perempuan. Hal ini karena belum ada uraian yang mampu menjelaskan mengenai konsep gender dan mengapa hal ini penting untuk memahami ketidakadilan sosial.

Untuk memahami konsep gender perlu dibedakan kata gender dengan seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Secara permanen ini tidak dapat diubah dan merupakan ketentuan biologis, sering dikatakan sebagai kodrat¹¹.

Sedangkan konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri sebenarnya dapat dipertukarkan. Artinya laki-laki bisa saja lemah lembut, emosional, keibuan/keibuan sementara ada juga perempuan yang kuat dan perkasa. Perubahan ciri dan sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain.¹²

¹¹ Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, h. 8

¹² Fakih, Mansour, *Analisis Gender*, h. 8-9

M. Nursalim Malay dan Elly Rosana: PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN ...

Sejarah perbedaan ini dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan ataupun negara. Dan akhirnya, dianggap sebagai ketentuan Tuhan dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan. Perbedaan-perbedaan inilah yang pada tingkat selanjutnya, melahirkan ketidakadilan sosial, terutama bagi wanita.

Sebenarnya perbedaan gender tidak akan menjadi masalah apabila tidak melahirkan *gender inequality*, tapi masalahnya, perbedaan gender ternyata melahirkan persoalan rumit dimana laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem dan struktur ketidakadilan tersebut.

Ketidakadilan gender ini termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu marginalisasi/proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan perempuan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender¹³. Manifestasi ketidakadilan ini tidak bisa dipisah-pisah, saling berkaitan, saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satupun manifestasi yang lebih penting dan lebih esensial. Misalnya, anggapan bahwa pemiskinan perempuan di wilayah ekonomi adalah lebih penting dan mendasar sehingga harus dipecahkan terlebih dulu.

Manifestasi gender yang menimbulkan subordinasi pada perempuan. Terutama karena sifat-sifat yang melekat dan dikonstruksikan pada perempuan. Anggapan bahwa perempuan irrasional dan lemah lembut mengakibatkan perempuan tidak bisa dan mampu tampil sebagai pemimpin. Sehingga pada akhirnya, jarang sekali perempuan yang bisa tampil di ranah publik dan politik. Atau menduduki jabatan-jabatan strategis dalam partai politik atau lembaga politik formal lainnya.

¹³ Fakih, Mansour ., *Analisis Gender*, h.12

b. Budaya Politik Patriarki

Subordinasi perempuan di bidang politik juga diakibatkan karena adanya budaya politik patriarki yang menjadi acuan dalam proses politik suatu di Indonesia. Pemikiran Muhaimin tentang budaya politik pada hakekatnya berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang merupakan dasar dari semua tindakan¹⁴. Tindakan ini dilandasi oleh nilai-nilai yang telah berkembang dalam diri warga negara, baik sebagai individu maupun kelompok. Nilai-nilai yang disokong oleh tradisi ini membentuk budaya politik.

Masyarakat Indonesia yang secara sosio kultural merupakan masyarakat plural mempunyai satu bentuk sistem politik yang spesifik karena adanya peran militer yang unik. Rezim militer memperlihatkan gaya laki-laki dan ini terpenetrasi dalam budaya dan etos politik formal. Budaya dan etos politik ini diwarnai oleh gaya hidup maskulin. Sehingga akhirnya laki-lakilah yang memformulasi aturan-aturan politik sesuai nilai dan norma laki-laki.

Ada dua kekhasan yang melekat pada budaya politik Indonesia¹⁵. Pertama, struktur hubungan yang memperlihatkan adanya hubungan patron-klien (bapak-anak atau bawahan-atasan), dan kedua adanya rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Meskipun dua hal tersebut adalah percampuran berbagai macam budaya, namun budaya dari Suku Jawalah yang paling dominan. Dominasi ini karena memang orang Jawa yang senantiasa mendominasi kehidupan politik di Indonesia.

Hubungan patron-klien pada akhirnya akan melahirkan dominasi laki-laki dan mengucilkan perempuan di dunia politik. Dalam hubungan keluarga misalnya, posisi ayah menempati urutan utama

¹⁴ Muhaimin, dalam Musdah Mulia. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*, Kibar Press, Yogyakarta, 2008, h. 186

¹⁵ Muhaimin, dalam Musdah Mulia. *Menuju Kemandirian Politik*, h. 187

dan pertama, sedangkan ibu tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam keluarga. Pada akhirnya, ayahlah yang menempati struktur sosial tinggi dalam masyarakat, sementara ibu hanya berada posisi 'melegitimasi' keputusan tersebut.

Dari fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan sosial merupakan basis dan sumber hubungan politik¹⁶. Dalam hubungan sosial politik kelihatan bahwa masyarakat Jawa bersifat personal. Semua kecenderungan sosio kultural ini memperkental sistem patron-klien. Dan digunakan untuk menjaga harmoni dalam masyarakat. Ini diakibatkan oleh sistem pemerintahan jaman dulu yang bersifat sentralistik dimana seorang raja cenderung mewariskan kekuasaannya pada laki-laki. Dalam hal ini tidak ada bagian untuk perempuan, karena semuanya telah habis dibagi kepada laki-laki.

c. Hambatan Individual

Mengapa kualitas SDM perempuan masih rendah ? Sejak dini perempuan sudah dibesarkan dan dikondisikan untuk merasa tidak aman dan tidak nyaman terhadap dunia politik. Hal ini mengakibatkan perempuan menjadi tidak percaya diri dan tidak tertarik dengan politik. Faktor lain adalah rendahnya tingkat pendidikan perempuan, kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi, termasuk pemahaman tentang sistem politik di Indonesia. Mutu dan kualitas SDM ini hanya bisa ditingkatkan manakala ada *political will* dari pemerintah pusat.

d. Hambatan Kelembagaan dan Struktural

Sikap maskulin dari sistem politik Indonesia, peraturan-peraturan yang diskriminatif dan bias gender, tindakan *affirmatif* tanpa sanksi di UU Pemilu, ini merupakan rintangan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik dan kebijakan publik. Sistem Pendidikan Nasional yang tidak memberikan info cukup untuk pendidikan kesetaraan gender, misalnya terlihat dari banyaknya buku ajar untuk

¹⁶ Muhaemin, dalam Musdah Mulia. *Menuju Kemandirian Politik*, 189

M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PERBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN..

anak-anak sekolah yang masih bias gender. Sistem perencanaan pembangunan “*top down*” yang bias gender, serta kurangnya pemahaman isu-isu gender dari pejabat pemerintah dan pembuat kebijakan dari pusat hingga daerah.

Metode yang digunakan dalam Pengabdian Masyarakat ini adalah: Ceramah Diskusi terarah, dan Simulasi Pemilu serta Evaluasi. Subyek penyuluhan pemberdayaan politik perempuan adalah peserta didik perempuan yang berpendidikan Madrasah Aliyah (setingkat SMA) di Pondok Pesantren Diniyyah Putri, dengan jumlah 20 orang.

Subyek penyuluhan pemberdayaan politik perempuan adalah peserta didik perempuan yang berpendidikan Madrasah Aliyah (setingkat SMA) di Pondok Pesantren Diniyyah Putri, dengan jumlah 20 orang.

Sumber datanya adalah data primer yang langsung diperoleh dari peserta, data diperoleh dengan memberikan angket yang bersifat pre-test dan post-test, kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan komparatif antara pre-test dan post-test. Penerapan metode ini sering juga disebut quasi experimental.

Quasi experiment didefinisikan sebagai eksperimen yang memiliki perlakuan, pengukuran dampak, unit eksperimen namun tidak menggunakan penugasan acak untuk menciptakan perbandingan dalam rangka menyimpulkan perubahan yang disebabkan perlakuan.¹⁷ Jenis ini juga sering kali disebut sebagai post-hoc research yang berarti bahwa peneliti dapat melihat efek yang terjadi dari sebuah variabel setelah kejadian tertentu.¹⁸

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan yang dilaksanakan dengan tema “Pemberdayaan Politik Perempuan” yang diikuti oleh 20 santri Pondok Pesantren

¹⁷ Thomas .D & Donald T. Campbell, 1979, *Quasi Experimentation Design & Analysis Issue for Field Settings*, Houghton Mifflin Company:BostonLevy,

¹⁸ Salkind, Neil, J, 2006, *Exploring Reaseach*, six edition, Pearson International, 234

Diniyah Putri dengan tingkat pendidikan Madrasah Aliyah. Ada beberapa hasil yang diperoleh yaitu :

a. Pengetahuan

Terjadi peningkatan pengetahuan para peserta hal ini terlihat dari perubahan jawaban pada saat pre-test dan post menyangkaut aspek; pengetahuan mengenai apakah jenis kelamin sama dengan gender, ada 15 peserta atau 75 % yang bahwa gender tidak sama dengan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah bawaan sedangkan gender adalah hasil konstruksi sosial. Terkait UU yang mengatur keterwakilan perempuan dalam politik, dari hasil pre-test sebelum pemberian materi hanya ada tiga (3) peserta yang menjawab betul dan setelah pemberian materi berlangsung serta diskusi tanya jawab maka terjadinya lonjakan nilai yang sangat dratis yaitu bahwa semua peserta menjawab betul bahwa ada undang-undang yang mengatur keterwakilan perempuan di lembaga politik yaitu Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

Sedangkan untuk pengetahuan mengenai jika partai politik tidak mencalonkan perempuan sebesar 30 % sebagai calon anggota DPRD Kota/Kabupaten/, DPRD-Provinsi dan DPR-RI, KPU berhak menggugurkan atau membatalkan partai tersebut sebagai peserta pemilu. Hasil yang diperoleh tidaklah mengalami peningkatan yang tinggi, dari pre-test hanya tiga (3) peserta yang menjawab betul dan pada post-test ada delapan (8) peserta yang menjawab betul. Menurut undang-undang hal ini memang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU, namun dalam kenyataannya belum pernah terjadi.

Kenaikan yang signifikan tersebut tidak lepas dari pengetahuan yang diperoleh selama penyuluhan. Menurut Notoatmodjo, pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagiaian besar

M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PERBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN..

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga¹⁹. Dalam wikipedia dijelaskan; Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna.

b. Sikap atau pandangan

- 1).Ada 60 % peserta (12 orang) yang menyatakan bahwa organisasi para istri di kantor suami (misalnya darma wanita dll) masih diperlukan.
- 2).Sebagian besar peserta (90 persen) menyatakan bahwa perempuan perlu diberi kuota untuk calon anggota legislatif.
- 3).Ada 12 peserta (60 persen) yang menyatakan bahwa keterwakilan perempuan tidak perlu di atur oleh UU karena jika dia berkualitas tentu akan dipilih.
- 4).Seluruh peserta menyatakan bahwa diperlukah menteri khusus pemberdayaan perempuan
- 5) Diketahui 15 peserta (75 persen) menyatakan bahwa perempuan belum setara dengan laki-laki.
- 6).Terdapat 17 peserta atau 85 persen sudah memiliki perilaku afirmatif yang menyatakan akan mengutamakan kaum perempuan berbagai hal

Perubahan sikap yang terjadi pada para peserta sangat terkait dengan penyuluhan dan pengalaman yang terjadi. Hal ini senada dengan pendapat Berkowitz sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut²⁰.

¹⁹ Soekidjo Notoatmodjo, 2003, *Pendidikan dan perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.122

²⁰ Berkowitz, L, 1972, *Social Psychology*, Glenview III: Soct, Foresman and Company, hal. 254

Baron & Byrne mengatakan bahwa sikap adalah evaluasi terhadap berbagai aspek dalam dunia sosial.²¹ Sedangkan Krech dkk (1962) mengemukakan bahwa sikap merupakan suatu sistem yang ada dalam diri seseorang yang menekankan adanya hubungan tiga komponen, yaitu kognitif, afektif dan konatif. Seseorang akan bertindak setelah terbentuk komponen, yaitu kognitif, afektif dan konatif dalam dirinya terhadap suatu obyek sikap.

c. Aspek Konatif Alasan Memilih

- a. Seluruh peserta menyatakan akan memilih kaum perempuan ;
Jika hari ini dilakukan pemilihan umum.
- b. Pada pre-test alasan memilih caleg dengan pertimbangan sesama kaum perempuan menempati peringkat delapan dari 12 alternatif yang ditampilkan.
- c. Dari hasil post-test terjadi peningkatan bahwa pertimbangan memilih kaum perempuan sebagai calon anggota DPRD/DRP-RI/DPD, ada pada peringkat ke-4.

d. Simulasi Pemilu

Dari hasil simulasi yang dilaksanakan, bahwa simulasi sangat signifikan merubah sikap dan pandangan tentang caleg perempuan karena dari 11 orang yang dipilih sebagian besar (9 orang caleg) adalah perempuan dengan suara tertinggi Caleg nomor 5 dari Partai Garuda atas nama Dr.Hj.Zuliana Abidin, SE, M.Si dengan 5 suara, pada hal peserta yang telah ikut memilih dalam pileg 2014 tidak ada satupun yang memilih kaum perempuan sebagai caleg baik di DPRD, DPR-RI.

Untuk simulasi DPD-RI dengan 26 calon diperoleh hasil dengan urutan terbesar adalah ; Caleg no.25. Ir. Roro Ary Werdani memperoleh 10 suara dan Caleg no.24. Tuti W. Malano memperoleh 6 suara.

²¹ R. A Baron, & D Beyrne, *Social Psychology, Understanding Human Interaction*, (Boston , MA : Allyn and Bacon, 2004), 326

M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PERBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN..

Penutup

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan, ada beberapa hasil yang bisa disimpulkan yaitu a. Terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan terkait masalah gender dan politik dan kesetaraan gender, b. Adanya pemahaman yang baik terhadap persoalan perempuan dan politik sehingga melahirkan sikap yang positif tentang pemberdayaan perempuan dalam bidang politik yang pada akhirnya memperkuat aksi afirmatif atau keberpihakan terhadap kaum perempuan.

Dari hasil pengabdian masyarakat kepada satri Madrasah Aliyah Diniyyah Putri, umumnya siswa mudah terjadi perubahan sikap jika persoalan-persoalan yang disampaikan termasuk kebijakan pemerintah misalnya tentang pemberdayaan perempuan. Untuk itu jika ada program-program pemerintah yang memerlukan sosialisasi maka Yayasan Pondok Pesantren Diniyyah Putri bisa mengajukan program kelembaga terkait.

Mengingat pentingnya data dan informasi KPU tentang keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik, sehingga kita berharap agar KPU dapat dengan segera mengumumkannya melalui media massa dan media informasi milik KPU. Akhirnya, perbedaan dan diskriminasi terhadap gender dapat di reduksi dalam usaha pemberdayaan perempuan.

Pada dasarnya kaum perempuan cukup tergerak dengan adanya afirmatif action, untuk itu jika mendekati pemilihan umum maka diharapkan program-program penyuluhan atau sosialisasi calon-calon anggota legislative perempuan harus ditingkatkan sehingga keterwakilannya di parlemen cukup signifikan.

Untuk pengabdian masyarakat selanjutnya untuk tema “Pemberdayaan Politik Perempuan” perlu dicoba masyarakat sasaran yaitu ibu-ibu rumah tangga karena diduga ibu-ibu tersebut yang sering menjadi sasaran kampanye money politic oleh para tim sukses calon anggota legislatif

M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PEMBERDAYAAN POLITIK
PEREMPUAN ...

Daftar Pustaka

- Baron, R, A & D Beyrne, *Social Psychology, Understanding Human Interaction*, Boston, MA :Ally and Bacon, 1991
- Berkowitz, L, *Social Psychology*, Glenview III: Soct, Foresman and Company, 1972
- Darwin ,Muhadjir M. *Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Wacana, 2005
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Fayumi, Badriyah ,dkk *Argumen Agama atas Kepemimpinan Politik Perempuan, dalam Isu-isu Gender dalam Islam*. Jakarta : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, 2001
- Ife, JW, 1995, *Community Development : Creating Community, Alternatives, Vision, Analysis and Practice*, Longman : Australia
- Inpres 9 tahun 2000 tentang *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*
- Linz, Juan J dan Alfred Stepan. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. The Johns
- Muhaimin, dalam Musdah Mulia. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*, Kibar Press, Yogyakarta, 2008
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PERBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN..

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2007

Salkind, Neil, J, 2006, *Exploring Reaseach, six edition*, Pearson International,

Sa'idah, Najmah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, Jakarta: Idea Pustaka Utama, 2003

Thomas .D & Donald T. Campbell, 1979, *Quasi Experimentation Design & Analysis Issue for Field Settings*, Houghton Mifflin Company:BostonLevy,

Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN DI PONDOK PESANTREN DINIYAH PUTRI LAMPUNG

ORIGINALITY REPORT

21 %

SIMILARITY INDEX

19 %

INTERNET SOURCES

11 %

PUBLICATIONS

14 %

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On